



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH - 04.AH.11.01 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MASA BHAKTI 2019-2024**

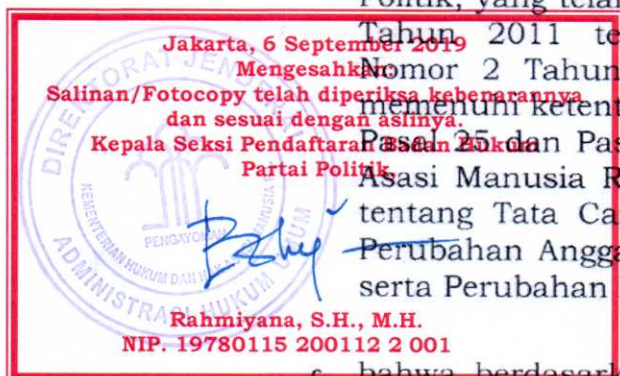
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: Istimewa, tanggal 27 Agustus 2019, hal Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bhakti 2019-2024;

b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bhakti 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara





Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN

SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MASA BHAKTI 2019-2024.

Jakarta, 6 September 2019  
Mengesahkan  
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan isinya.  
KESATU Mengesahkan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bhakti 2019-2024, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Raden Saleh No.9 Jakarta Pusat 10430, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 11, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pernyataan Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa, yang dibuat dihadapan Oktaviana Kusuma Angraini, S.H., M.Kn, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.

Rahmiyana, S.H., M.H.  
NIP. 19780115 200112 2 001

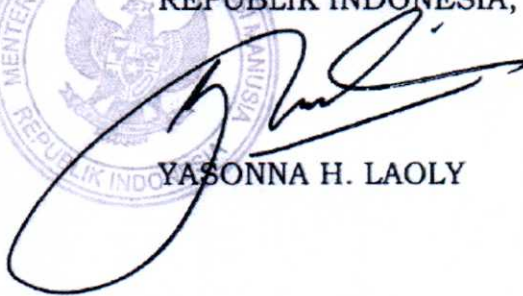
- KEDUA : Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bhakti 2019-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 TAHUN 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2014-2019, tanggal 19 September 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**



  
**YASONNA H. LAOLY**

Jakarta, 6 September 2019

Mengesahkan:

Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya  
dan sesuai dengan aslinya.

Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum  
Partai Politik,



  
**Rahmiyana, S.H., M.H.**

**NIP. 19780115 200112 2 001**





Lampiran  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor : M.HH - 04 .AH.11.01 Tahun 2019  
Tanggal : 30 Agustus 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MASA BHAKTI 2019-2024**

**DEWAN SYURA :**

**Ketua** : **K.H. Dimiyati Rois**  
Wakil Ketua : K.H. Manarul Hidayah  
Wakil Ketua : K.H. Abdul Ghofur  
Wakil Ketua : H. Andi Muawiyah Ramli  
Wakil Ketua : K.H. Subhan Makmun  
Wakil Ketua : K.H. Munif Zuhri  
**Sekretaris** : **H. Syaifullah Maksum**  
Wakil Sekretaris : K.H. Maman Imanul Haq  
Wakil Sekretaris : H. Bahruddin Nashori  
Wakil Sekretaris : Habib Hilal Al Aidid  
**Anggota** :

1. K.H. Syihabuddin Ahmad
2. Nyai Hj. Nurhayati Said Agiel
3. H. Syaiful Bahri Anshori

4. ~~K.H. Acep Adang Ruchiat~~

Jakarta, 6 September 2019

5. ~~K.H. M. Abdur Aziz Masturo~~

Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya

6. ~~K.H. Nabil Abdul Qodir~~

dan sesuai dengan aslinya

Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum

Partai Politik

7. K.H. Abdul Aziz Afandi

8. Nyai Hj. Lutfah Sohib

9. H. Taufiq R. Abdullah

Rahmiyana, S.H., M.H.

10. ~~H. Usman Anshor~~

11. K.H. Haidar Muhaiminan

12. H. Arvin Hakim Toha

13. K.H. Unais Ali Hisyam

14. Hj. Mufidah Rozy Munir

15. Hj. Istibsyarah

16. Hj. Nursjahbani Katjasungkana

17. H. Abdul Wahid Maktub

18. H. Otong Abdurrahman
19. H.M. Yusuf Mujenih
20. H. Dedy Wahidi
21. K.H. Moch. Nasrudin
22. H. Abdul Haris

**DEWAN TANFIDZ :**

**Ketua Umum : DR. DRS. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si**

- Wakil Ketua Umum Ideologi dan Kaderisasi : M. Hanif Dhakiri
- Wakil Ketua Umum Kesra dan Perekonomian : Ida Fauziyah
- Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu : Jazilul Fawaid
1. Ketua Bidang Kemaritiman dan Pertanian : Eko Putro Sandjojo  
Sekretaris : Caswiyono Rusydie
  2. Ketua Bidang Pembangunan Desa dan  
Pertanahan : Marwan Jakfar  
Sekretaris : Zainul Munasichin
  3. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan  
Bencana : Marwan Dasopang  
Sekretaris : Luqman Hakim Al Jambi
  4. Ketua Bidang Hukum dan Perundang-  
Undangan : Cucun A. Syamsurijal  
Sekretaris : N.M. Dipo Nusantara Pua  
Upa
  5. Ketua Bidang Energi dan SDA : Daniel Johan  
Sekretaris : Irmawan
  6. Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif : Ahmad Syauqi Ma'ruf Amin  
Sekretaris : Yucundianus Lepa
  7. Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan  
Pariwisata : Chusnunia  
Rahmiyana, S.H., M.H.  
NIP. 19780115 200112 2 001  
Sekretaris : Aletta Baun
  8. Ketua Bidang Kebudayaan dan  
Masyarakat Adat : Muamir Muin Syam  
Sekretaris : Rukmini Paata Toheke
  9. Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi : Ahmad Iman Syukri  
Teknologi : Bambang Elfianto  
Sekretaris :





10. Ketua Bidang Kesehatan dan Inklusi : Nihayatul Wafiroh  
Difabel  
Sekretaris : Muhammad Khadafi
11. Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri : Luluk Nur Hamidah  
Sekretaris : Hijroatul Maghfiroh
12. Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan : Yaqut C. Qoumas  
Sekretaris : Alfa Isnaeni
13. Ketua Bidang Pengembangan SDM : Yanuar Prihatin  
Sekretaris : Eman Hermawan
14. Ketua Bidang Pendidikan dan Pesantren : M. Yusuf Chudlori  
Sekretaris : Abdul Wahid
15. Ketua Bidang Perindustrian dan : Lukmanul Khakim  
Perdagangan  
Sekretaris : Sofyan Ali
16. Ketua Bidang Olahraga, Kesenian, dan : Faisol Riza  
Milenial  
Sekretaris : Arzetti Bilbina
17. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan : Fathan Subkhi  
Sekretaris : Purnama Dedy Setyawan
18. Ketua Bidang Agama dan Dakwah : Syaikhul Islam  
Sekretaris : M. Makky Zamzami
19. Ketua Bidang Penguatan Eksekutif, : A. Halim Iskandar  
Legislatif, dan Pengurus



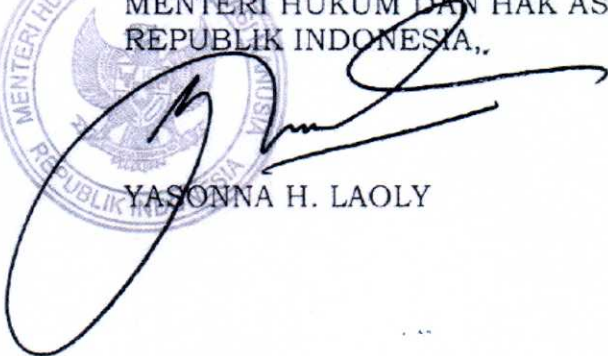
20. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan : A. Malik Haramain  
dan Perlindungan Anak : Siti Masrifah  
Sekretaris : Farida Fariyah
21. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Migran : Dita Indah Sari  
Indonesia : Nur Nadhifah  
Sekretaris

- Sekretaris Jenderal : M. Hasanuddin Wahid**  
Wakil Sekretaris Jenderal : Anggia Ermarini  
Wakil Sekretaris Jenderal : Risharyudi Triwibowo  
Wakil Sekretaris Jenderal : Syaiful Huda  
Wakil Sekretaris Jenderal : Eem Marhamah Zulfa Hiz  
Wakil Sekretaris Jenderal : Hindun Anisah

<b>Bendahara Umum</b>	:	<b>Nur Yasin</b>
Wakil Bendahara	:	Bambang Susanto
Wakil Bendahara	:	Bertu Merlas
Wakil Bendahara	:	Ana Muawanah
Wakil Bendahara	:	Mulyadi Siregar, S.E., MBA.
Wakil Bendahara	:	Peggy Patricia Patipi
Wakil Bendahara	:	Erni Sugianti
Wakil Bendahara	:	Nashim Khan
Wakil Bendahara	:	Febri Diana
Wakil Bendahara	:	Ella Siti Nuryamah
Wakil Bendahara	:	Evi Fatimah
Wakil Bendahara	:	Usman Sidik



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA.,

  
YASONNA H. LAOLY

Jakarta, 6 September 2019  
Mengesahkan:  
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya  
dan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum  
Partai Politik,  
  
Rahmiyana, S.H., M.H.  
NIP. 19780115 200112 2 001